


Nomor Poster : 20
 Judul : Insentif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan
 Penulis : Danang Pramudita
 Keterangan : Pernah dipresentasikan pada Program Studi Ilmu PWD IPB
 Email : dannpramudita@gmail.com
 Kategori SDGs : 



INSENTIF DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Danang Pramudita (dannpramudita@gmail.com)
 Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Pascasarjana IPB
 Komisi Pembimbing : Dr Ir Arya Hadi Dharmawan, MScAgr dan Dr Ir Baba Barus, MSc

LATAR BELAKANG

Perubahan penggunaan lahan pertanian primer menjadi industri, perumahan, dan penggunaan lain pada daerah kota dan sekitarnya terjadi sejak tahun 1980an. Konversi lahan pertanian berdampak terhadap kehilangan produksi pertanian, pengangguran, kerugian investasi infrastruktur pertanian dan hilangnya fungsi ekologis lahan (Firman 1999).

Upaya penyelamatan lahan pertanian pangan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mewajibkan setiap daerah (kabupaten/kota) di Indonesia untuk melindungi ketersediaan pangannya.

Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat menetapkan luas usulan LP2B di dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan dengan didukung Perda No. 7 tahun 2015 tentang LP2B yang mengatur mengenai penetapan, sosialisasi dan pemberian insentif pelaksanaan LP2B.

Penelitian ini hendak menjawab bagaimana pelaksanaan program LP2B dapat menahan laju konversi lahan, mempertahankan produksi pangan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

HASIL PENELITIAN

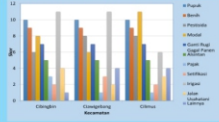
Kesesuaian Kriteria Sosial Ekonomi LP2B

Kriteria sosial ekonomi perlu menjadi pertimbangan karena lahan pertanian memiliki manfaat baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan.


Kecamatan Cibingbin memiliki kesesuaian kriteria sosial ekonomi sebesar 77,78%. Kecamatan Clawigebang dan Kecamatan Cilimus memiliki kesesuaian kriteria sosial ekonomi sebesar 44,44%. Kecamatan Clawigebang dan Cilimus dengan kesesuaian kriteria sosial ekonomi rendah perlu mendapat prioritas penanganan.

Jenis Insentif LP2B

Jenis Insentif utama yang dibutuhkan petani di tingkat wilayah berupa pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi termasuk sumber airnya. Jenis insentif yang dibutuhkan petani di tingkat individu berupa modal, pupuk dan benih.



Gambar 2 Jenis Insentif LP2B di Lokasi Penelitian



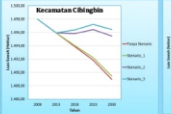
Gambar 3 Kondisi Jaringan Irigasi di Lokasi Penelitian

TUJUAN

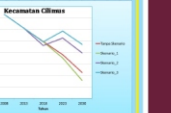
- Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan
- Menentukan jenis dan mekanisme insentif perlindungan LP2B


SIMULASI PERLINDUNGAN LP2B

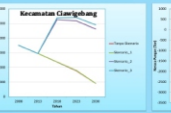
Pemberian insentif dengan skenario 2 dan skenario 3 mampu meredam konversi lahan dan mempertahankan surplus neraca pangan. Penerapan kedua skenario ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.














Gambar 4 Hasil Simulasi Skenario di Lokasi Penelitian

METODE

Lokasi Penelitian: Kecamatan Cibingbin, Clawigebang, dan Cilimus Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Waktu Penelitian: Penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2014 – Desember 2014

Data Sekunder: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kuningan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

Data Primer: Wawancara petani dan informan

Analisis Data: Statistik Deskriptif dan Sistem Dinamik (Waktu simulasi 2008-2030)

KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan LP2B diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kesesuaian kriteria sosial ekonomi yang rendah.

Skenario pemberian insentif yang dipilih disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Selain pemberian insentif perlu dibuat disinsentif bagi pihak yang mengkonversi lahan pertanian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Aspek sosial ekonomi berfungsi untuk melengkapi kriteria LP2B dari aspek fisik. Aspek sosial ekonomi selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian insentif bagi petani. Model perlindungan LP2B yang dibuat terdiri dari tiga subsistem (Gambar 1). Model digunakan untuk merancang tiga skenario penerapan insentif agar lahan pertanian dapat dipertahankan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

RUJUKAN

Firman T. 1999. Rural to urban land conversion in Indonesia during boom and bust periods. Land Use Policy. 17(2000): 13-20

Lefroy Rod D.B, Hans-Dieter B, Mohammad R. 2000. Indicator Sustainable Land Management Based on Farmer Surveys in Vietnam, Indonesia, and Thailand. Agriculture, Ecosystems and Environment. 81(2000): 137-146

Muhammad, Aminullah E, Soesilo B. 2001. Analisis Sistem Dinamis : Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. Jakarta (ID): UM Press.

Kecamatan	Laju Konversi Lahan Historis	Kesesuaian Kriteria Sosial Ekonomi	Skenario Insentif yang dibutuhkan	Kebijakan Penanganan LP2B
Cilimus	Tinggi (-5,47%)	Rendah (44,44%)	Tinggi	Prioritas 1
Clawigebang	Sedang (-0,60%)	Rendah (44,44%)	Moderat	Prioritas 2
Cibingbin	Rendah (-0,02%)	Tinggi (77,78%)	Rendah	Prioritas 3